



RIZKY ADRI KURNIADHANI/JOGLLO JOGJA

DITANGANI: Progres Pembangunan kawasan kumuh di selatan bendung Mergangsari, Prawirodirjan, kemarin.

Lakukan Penataan 3 Kawasan Kumuh

KOTA, *Joglo Jogja* - Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogyakarta melakukan penataan kawasan kumuh di tiga lokasi bantaran sungai. Antara lain di wilayah Prawirodirjan, Klitre RW 05, dan Pakuncen RW 8.

Kepala Bidang (Kabid) Perumahan dan Kawasan Permukiman DPUPKP Kota Yogyakarta, Sigit Setiawan mengungkapkan, penataan kawasan kumuh itu dilakukan berdasarkan indikator kumuh yang paling dominan belum tertangani.

 Baca **LAKUKAN...** Hal II

Lakukan Penataan 3 Kawasan Kumuh

sambungan dari hal Joglo Jogja

Salah satunya di kawasan Prawirodirjan, pembangunan dilakukan di sepanjang bantaran Sungai Code. Tepatnya di selatan Bendung Mergangsan.

Dalam penataan itu, pihaknya melakukan berkolaborasi dengan Kelurahan Prawirodirjan yang sudah memiliki rencana induk penataan. Yakni dengan konsep fasilitas ruang terbuka publik di bantaran sungai dengan pembangunan pendopo, *amphitheater*, toilet, dan taman

dilengkapi tempat bermain anak. Pekerjaan ini ditargetkan selesai Oktober mendatang.

“Pola penataannya kami ingin mendekati sungai sebagai area yang bisa dimanfaatkan oleh siapa saja. Selama ini talut seolah memisahkan antara sungai dengan area permukiman. Karena space-nya ada, kami coba buat *amphitheater*. Sehingga harapannya nanti sungai itu adalah wahana bersama, bisa kita jaga sama sama,” terangnya.

Sedangkan khusus di Pakuncen dan Klitren, kata Sigit, indikator kumuh yang belum tertangani adalah dari sisi sanitasi dan membuka akses jalan tepi sungai. Diharapkan, penanganan kumuh pada sanitasi itu bisa menurunkan skor indikator sehingga tidak masuk kumuh. Ditargetkan, penataan kawasan kumuh di Klitren selesai pada November tahun ini.

“Di Klitren dan Pakuncen fokusnya ke penataan sanitasi dan

jalan tepi sungai. Jadi nantinya dari sisi operasional untuk pemeliharaan talut maupun mitigasi. Kalau terjadi longsor dan sebagainya akan lebih mudah kalau ada jalan inspeksi,” pungkasnya.

Ia menjelaskan, penataan kawasan kumuh tahun ini menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta. Yakni dengan anggaran rata-rata berkisar Rp 700 juta sampai Rp 900 juta per-paket pekerjaan. **(riz/mg4)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 31 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005